



EDISI JUMAT 13 FEBRUARI 2026

HARIAN

LENTERA

Inspirasi Perubahan



02

POLITIC
Penyegelan Tiffany & Co Baru Awal, Purbaya Wanti-wanti Toko Emas Lain

04

NUSANTARA
Penembakan Smart Air di Papua Diburu! Pelaku 2 Batalyon KKB Yahukimo

10

LISTSTYLE
Memakai Sunscreen saat Musim Hujan Penting, Kenapa?

PUTING BELIUNG PORAK-PORANDAKAN STADION PAKANSARI

Hujan lebat disertai angin puting beliung menerjang kawasan Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor, Kamis siang (12/2/2026), mengakibatkan atap utama stadion pirak-poranda. Angin kencang yang terjadi selepas zuhur itu juga merobohkan sebagian plafon, merusak Gedung Laga Tangkas, menumbangkan pohon, serta menyeret beberapa gerobak dan sepeda motor milik warga dan pedagang yang sempat berlarian menyelamatkan diri. Petugas gabungan dari BPBD dan Damkarmat Kabupaten Bogor langsung melakukan penanganan dan evakuasi di lokasi. (ist.antara)

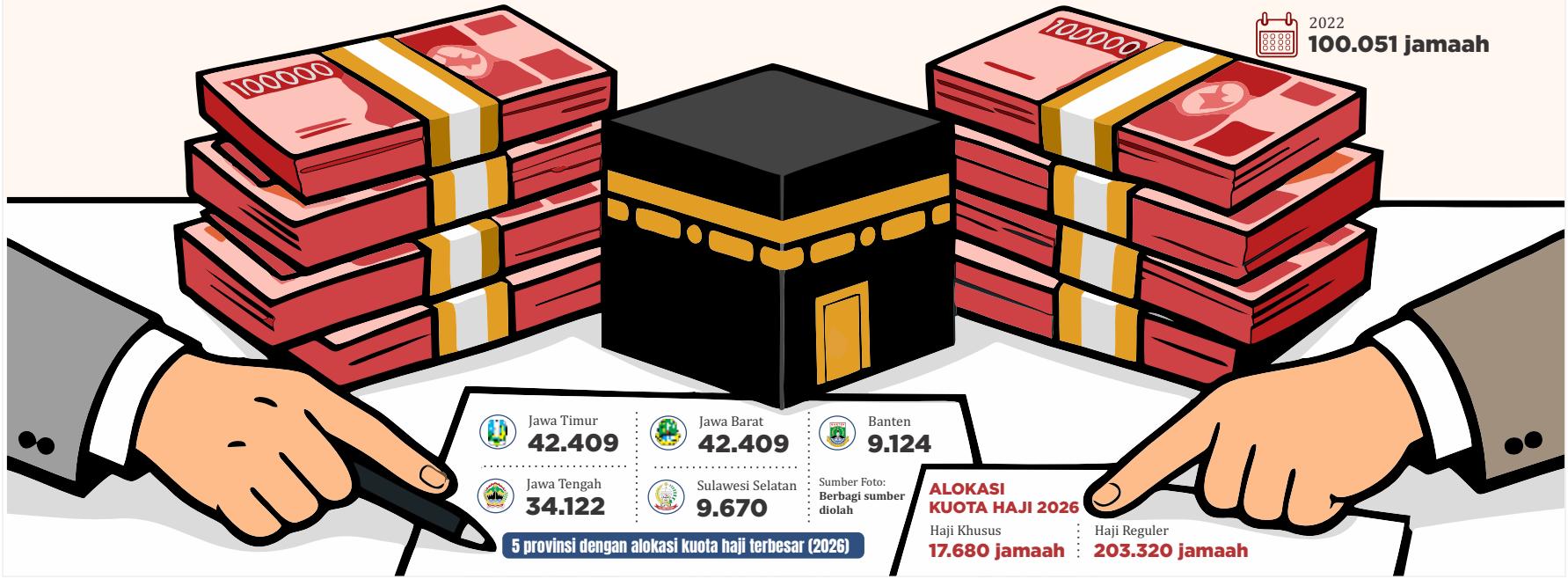
DEKATI MUSIM HAJI, KEMENHAJ-KEMENAG BERPOLEMIK SOAL GAJI

Menjelang keberangkatan perdana jamaah haji Indonesia pada 22 April 2026, Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Kementerian Agama (Kemenag) malah berpolemik. Permasalahan mencuat karena Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemenhaj dilaporkan belum menerima gaji selama dua bulan. Keluhan itu disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Haji dan Umrah di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (10/2/2026). Hal inipun langsung menjadi sorotan karena terjadi di tengah fase krusial, saat 203 ribu jamaah harus dilayani. Kegaduhan makin nyaring karena kedua kementerian saling tuding. Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menyebut gaji belum bisa dibayarkan karena Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) dari instansi asal pegawai belum terbit. Sebaliknya, Kemenag--sebagai kementerian awal yang menaungi---menegaskan telah membayarkan gaji hingga Januari 2026. Sementara terkait keterlambatan terjadi karena Surat Keputusan Pengangkatan dari Kemenhaj belum keluar, sehingga proses administrasi terhambat. Di tengah tarik-menarik penjelasan itu, para ASN terdampak harus menanggung beban, sementara persiapan pemberangkatan ratusan ribu jamaah terus berjalan. BACA HAL 11...

Data Kuota Haji

dari Tahun ke Tahun:

2026	221.000 jamaah
2025	221.000 jamaah
2024	241.000 jamaah
2023	221.000 jamaah
2022	100.051 jamaah



PENYEGELAN TIFFANY & CO BARU AWAL, PURBAYA WANTI-WANTI TOKO EMAS LAIN

Penyegelan tiga gerai perhiasan mewah Tiffany & Co di Jakarta disebut bukan langkah terakhir. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberi peringatan kepada toko emas dan perhiasan impor lain agar segera memenuhi kewajiban kepabeanan dan perpajakan. Jika tidak, penyegelan serupa akan dilakukan.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kantor Wilayah Jakarta menyegel tiga gerai Tiffany & Co di Plaza Senayan, Plaza Indonesia, dan Pacific Place pada Rabu (11/2/2026). Penindakan dilakukan atas dugaan pelanggaran administrasi terhadap barang-barang impor bernilai tinggi yang diperdagangkan di toko tersebut.

Menteri Keuangan menegaskan, langkah itu merupakan bagian dari penertiban impor ilegal dan pengamanan penerimaan negara. Ia memastikan tindakan serupa bisa meluas ke pelaku usaha lain.

"Tergantung pas temuan di lapangan. Biasanya kan dikasih warning-warning dulu. Kalau mereka tetap enggak mau ya disegel," tegas Purbaya saat ditemui di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,



Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah (Kanwil) Jakarta melakukan penyegelan terhadap sejumlah toko perhiasan mewah Tiffany & Co di Jakarta pada Rabu (11/2/2026). (Dok. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah (Kanwil) Jakarta)

Kamis (12/2/2026).

Menurut dia, penyegelan dilakukan apabila ditemukan indikasi barang impor yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan kepabeanan, termasuk kewajiban pelunasan pungutan negara.

"Pokoknya impor yang ilegal pasti akan ditutup dan disegel. Jadi semuanya harus main ke legal lagi," kata Purbaya.

Ia menyebut, tindakan Bea Cukai merupakan bentuk kerja profesional dalam menjaga penerimaan negara

Pajak Januari Tumbuh 30%, Optimistis Defisit 2026 Terkendali

MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa optimistis defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 tetap berada dalam kendali setelah penerimaan pajak pada Januari 2026 tumbuh 30,8 persen secara tahunan.

"Hasil awal di bulan Januari, pajak tumbuh 30 persen dibanding Januari tahun lalu. Kalau kita tahan 30 persen terus, itu saja sudah melebihi target APBN, defisitnya akan turun," kata Purbaya dalam kegiatan Economic Outlook 2026 di Jakarta, Kamis (12/2/2026).

Berdasarkan laporan Kementerian Keuangan, penerimaan pajak pada Januari 2026 mencapai Rp116,2 triliun atau tumbuh 30,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Realisasi tersebut setara 4,9 persen dari target pajak dalam APBN 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun.

Secara keseluruhan, penerimaan negara hingga 31 Januari 2026 tercatat Rp172,7 triliun, tumbuh 9,8 persen dibandingkan Januari 2025 sebesar Rp157,3 triliun. Angka itu setara 5,5 persen dari target pendapatan negara dalam APBN 2026 yang dipatok Rp3.153,6 triliun.

Menurut Purbaya, strategi

menjaga penerimaan negara tidak ditempuh dengan menaikkan tarif pajak. Ia justru memilih mendorong pertumbuhan ekonomi agar basis pajak menguat secara alami.

"Saya nggak menaikkan tarif pajak, pajak yang daring saya tunda dulu, cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) saya tunda juga, karena saya tahu ketika ekonomi jatuh, pemerintah bukan mencekik ekonomi, harusnya memberi stimulus," ujarnya.

Ia menilai, perlambatan ekonomi akan langsung berdampak pada dunia usaha dan pada akhirnya menekan kemampuan membayar pajak. Karena itu, kebijakan fiskal diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan.

Secara paralel, pemerintah menyuntikkan likuiditas ke sektor perbankan guna mendorong pembiayaan ke sektor riil, mempercepat belanja pemerintah daerah, serta mengurai berbagai hambatan usaha. "Ekonomi yang lebih cepat adalah modal saya untuk mengendalikan pendapatan, rasio pajak, maupun defisit anggaran," kata mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tersebut.

Di sisi lain, Purbaya juga menegaskan

kan komitmennya melakukan "bersih-bersih" di lingkungan Kementerian Keuangan, khususnya di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), menyusul sejumlah kasus korupsi yang diungkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Diketahui, KPK menetapkan tiga pegawai DJP sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pengajuan restitusi pajak setelah operasi tangkap tangan (OTT) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara pada Januari 2026. Pada awal Februari 2026, OTT kembali terjadi di KPP Madya Banjarmasin dengan tiga pegawai ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu, KPK juga membongkar dugaan suap impor yang melibatkan tiga pejabat DJBC.

Menanggapi hal tersebut, Purbaya memastikan tidak akan mentolerir kelalaian pimpinan dalam mengawasi bawahannya.

"Kalau sampai tersangka betul sampai level satu di bawah pimpinannya, kita akan ganti terus sampai ke atas. Tidak bisa lagi kita bilang, 'Oh, saya tidak tahu itu di bawah saya, terlalu jauh'. Anda harus awasi itu," tegaskan.(ist,ant/dya)

Fakta Menarik Kehadiran Tiffany & Co di Indonesia:

Lokasi Gerai di Jakarta

- Plaza Indonesia: Terletak di Level 1.
- Plaza Senayan: Berada di Level 1.
- Pacific Place: Berada di Ground Floor, kawasan SCBD.

Pemilik Global:

- Sejak 7 Januari 2021, LVMH resmi mengakuisisi Tiffany & Co. senilai USD 15,8 miliar. LVMH dikendalikan oleh keluarga Bernard Arnault, yang sering dinobatkan sebagai salah satu orang terkaya di dunia.

Pemilik Global:

- Per Februari 2026, pihak manajemen atau pemilik (owner) perwakilan di Indonesia sedang dalam proses memberikan penjelasan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait penyegelan tiga gerai utama mereka di Jakarta atas dugaan pelanggaran administrasi impor.

sekaligus memastikan persaingan usaha berjalan adil.

"Nanti kalau orang bea cukai enggak ngapa-ngapain ditangkap, sekarang dia menjalankan tugasnya supaya pasar kita bersih dari barang-barang ilegal, supaya permainannya di sini fair di dalam negeri," ujarnya.

Di lapangan, penyegelan dilakukan setelah petugas Bea Cukai menggelar operasi terhadap barang kategori high value good. Kepala Seksi Penindakan DJBC Kanwil Jakarta, Siswo Kristyanto, mengatakan pihaknya menduga terdapat barang yang tidak diberitahukan dalam dokumen pemberitahuan impor.

"Kami dari Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta melakukan operasi terkait barang-barang high value good, yaitu barang-barang bernilai tinggi yang kami duga terdapat barang-barang yang tidak diberitahukan kepada pihak impor barang," kata Siswo.

Ia menjelaskan, penindakan tersebut menindaklanjuti instruksi Menteri Keuangan untuk menggali potensi penerimaan negara di luar yang selama ini rutin dipungut dari keabeanan dan cukai.

Atas perusahaan yang tengah diperiksa, DJBC kini melakukan kompilasi dan pencocokan data antara barang yang ada di gerai dengan dokumen impor yang telah dideklarasikan.(wid,rls,ant/dya)

Guru SD di Jember Telanjangi 22 Siswa

DPR DESAK PEMECATAN: PIDANA DAN PELECEHAN SEKSUAL

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyatakan langkah rotasi tidak menyelesaikan persoalan mendasar. "Kalau merotasi saja tidak cukup, teguran saja tidak cukup. Intinya harus ada efek jera. Kalau perlu memang bisa diberhentikan juga," kata Hetifah di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (12/2/2026).

Ia menegaskan, kebijakan memindahkan guru ke sekolah lain berisiko memindahkan masalah. "Kalau merotasi saja tidak cukup, teguran saja tidak cukup. Jadi tergantung kasusnya apa karena bisa jadi itu juga nanti akan membahayakan sekolah baru kalau yang bersangkutan tidak memahami atau menyadari bahwa itu adalah hukuman yang harus memberikan efek jera," ujarnya.

Komisi X DPR juga menilai tindakan tersebut melampaui batas kewenangan pendidik. Hetifah



Penampakan gerbang SDN Jelbuk 02 di Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Kamis (12/2/2026). (Ist)

menyebut perbuatan itu tidak dapat dibenarkan dalam konteks apapun.

"Ini jumlahnya banyak sekali walaupun ada alasan untuk melakukan itu untuk memastikan bahwa anak ini tidak ada menyembunyikan, tapi cara yang digunakan, apalagi sampai ditelanjangi, tentu itu sangat

mempermudah dan masuk dalam tindakan pidana kekerasan dan pelecehan seksual," kata legislator Partai Golkar itu.

Menurut Hetifah, dalam proses belajar mengajar dan penegakan disiplin, guru memiliki berbagai metode yang dapat ditempuh tanpa melanggar hak individu dan privasi

anak. Ia memahami bahwa situasi kehilangan di dalam kelas dapat menimbulkan tekanan bagi guru, tetapi tindakan kolektif yang mempermudah seluruh siswa tidak dapat dibenarkan.

"Tentu saja kami memahami bahwa guru merasa didalam pembelajaran, penegakan disiplin juga membutuhkan satu media, bagaimana jika ada pencurian di dalam kelas dan itu ingin dibuktikan, jadi harus ada mungkin ada teknik-teknik atau trik lain yang bisa dilakukan tanpa melakukan pelanggaran hak-hak anak juga," ujarnya.

Ia menambahkan, sekalipun dugaan pencurian melibatkan satu orang, tidak seharusnya seluruh siswa diperlakukan sama. "Dari 22 itu mungkin hanya 1 orang yang melakukan, itupun kalau ada yang melakukan di antara mereka, tapi yang diperlakukan banyak," kata Hetifah.

Selain mendesak sanksi tegas, Komisi X DPR meminta agar rekam jejak guru yang bersangkutan ditelusuri. Penelusuran itu dinilai penting untuk mengetahui apakah selama ini terdapat pendekatan pembelajaran yang melanggar prinsip pendidikan atau membuat siswa tidak nyaman.

"Tentu aspek ini sangat penting sebagai catatan bagi pendidik lainnya agar tidak terjadi hal serupa di sekolah-sekolah lainnya," ujar Hetifah.

Peristiwa bermula dari hilangnya uang pribadi guru berinisial F. Berdasarkan laporan yang beredar, total uang yang hilang mencapai Rp 275 ribu dalam dua kejadian terpisah. Uang Rp 200 ribu dilaporkan hilang pada Senin, 2 Februari 2026. Empat hari kemudian, Jumat, 6 Februari 2026, uang sebesar Rp 75 ribu kembali raib. Uang yang hilang terakhir disebut memiliki nilai emosional bagi guru tersebut.

Setelah kehilangan kedua, guru mengumpulkan siswa kelas V usai jam pelajaran berakhir. Terdapat perbedaan jumlah siswa dalam sejumlah laporan, yakni antara 22 hingga 27 siswa. Mereka diminta tetap berada di dalam kelas ketika siswa lain telah pulang.

Awalnya, pemeriksaan dilakukan dengan menggeledah tas para siswa. Namun karena uang tidak ditemukan, pemeriksaan berlanjut ke tahap yang lebih jauh. Siswa dipanggil satu per satu ke depan kelas. Sementara itu, siswa lain diminta menghadap ke tembok agar tidak melihat proses pemeriksaan.(wid,ant,dya)

KPAI: Rendahkan Martabat Anak, Potensi Langgar UU



Wali murid dan guru melakukan mediasi di SDN Jelbuk 02 Kecamatan Jelbuk Jember, Jawa Timur, Minggu (8/2/2026). Mereka menuntut kejelasan penanganan kasus guru menelanjangi siswa SDN Jelbuk 02 Jember. (Ist)

"Tindakan tersebut berpotensi melanggar UU Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)," kata Aris dalam keterangan pers yang diterima, Kamis (12/2/2026).

Ia menjelaskan, perbuatan itu dapat dikaitkan dengan Pasal 76C juncto Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang milarang segala bentuk kekerasan terhadap anak. Menurut Aris, kekerasan tidak hanya berbentuk fisik, tetapi juga psikis maupun perlakuan yang merendahkan martabat.

"Kekerasan tidak hanya fisik, tetapi juga psikis dan perlakuan yang merendahkan martabat anak," tegasnya.

Selain itu, KPAI juga menyoroti kemungkinan pelanggaran Pasal 76E UU Perlindungan Anak apabila

ditemukan unsur perbuatan cabul atau tindakan yang menyerang kehormatan seksual anak. "Unsur ini perlu didalami oleh aparat penegak hukum," ujar Aris.

Ia menambahkan, dari perspektif UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, perkara tersebut juga berpotensi masuk kategori kekerasan seksual apabila terdapat unsur pemaksaan atau penyalahgunaan relasi kuasa antara guru dan murid.

KPAI mendesak aparat penegak hukum segera melakukan penyelidikan dan penyidikan secara profesional untuk memastikan ada atau tidaknya unsur pidana. Di sisi lain, Dinas Pendidikan dan Pemerintah daerah diminta menjatuhkan sanksi tegas sesuai aturan kepegawaian dan kode etik guru.

Tak hanya itu, KPAI juga mendorong adanya pendampingan psikologis bagi seluruh siswa yang terdampak. Aris meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melakukan evaluasi secara nasional terhadap mekanisme pencegahan kekerasan di satuan pendidikan.(wid,ant/dya)

KOMISI Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengecam tindakan seorang guru di SDN Jelbuk 02, Jember, Jawa Timur, yang diduga menelanjangi 22 muridnya karena tuduhan pencurian uang Rp 75 ribu. KPAI menilai perbuatan tersebut merendahkan martabat anak dan berpotensi melanggar sejumlah ketentuan pidana.

Komisioner KPAI Aris Adi Leksono menegaskan, memaksa anak membuka pakaian di ruang kelas, terlebih di hadapan teman-temannya, merupakan tindakan yang mencederai integritas tubuh dan tidak dapat dibenarkan dengan alasan penegakan disiplin.

Penembakan Smart Air di Papua

DIBURU! PELAKU 2 BATALYON KKB YAHUKIMO

Satuan Tugas Operasi Damai Cartenz mengungkap dugaan pelaku penyerangan dan penembakan terhadap pesawat Smart Air di Bandar Udara Koroway Batu, Danowage, Yaniruma, Boven Digoel, Papua Selatan. Berdasarkan informasi sementara, pelaku diduga berasal dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) wilayah Yahukimo. Ditegaskan, aparat penegak hukum kini sedang memburunya.

Serangan terhadap pesawat jenis Cessna Grand Caravan bernomor registrasi PK-SNR itu menewaskan dua awak, Pilot Egon Erawan dan kopilot Baskoro, dalam insiden yang terjadi pada Rabu, 11 Februari 2026, sekitar pukul 11.30 WIT.

Kepala Humas Satgas Damai Cartenz Komisaris Besar Yusuf Sutejo menyatakan, berdasarkan informasi sementara, pelaku diduga berasal dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) wilayah Yahukimo.

"Pelaku adalah KKB dari Yahukimo pimpinan Elkius Kobak; Batalyon Semut Merah dan Batalyon Kanibal," kata Yusuf, Kamis (12/2/2026).

Berdasarkan data penerbangan, pesawat lepas landas dari Bandar Udara Tanah Merah pada pukul 10.35 WIT. Penerbangan menuju Koroway Batu berlangsung sekitar 30 menit dan mendarat mulus pada pukul 11.05 WIT. Pendaratan berlangsung normal tanpa indikasi gangguan.

Sekitar 10 hingga 15 menit setelah pesawat berhenti di apron, situasi berubah drastis. Pada kisaran pukul 11.17 WIT hingga 11.30 WIT, sekelompok orang tak dikenal yang diduga bersembunyi di area hutan sekitar bandara melepaskan tembakan ke arah pesawat. Tembakan diarahkan ke badan pesawat dan area sekitar landasan.

Akibat tembakan tersebut, pesawat mengalami kerusakan di sisi kanan, termasuk jendela yang pecah dan kebocoran pada tangki avtur. Situasi di dalam kabin berubah panik. Pilot dan kopilot segera menginstruksikan penumpang untuk keluar dan mencari perlindungan.

Egon, Baskoro, dan 13 penumpang++12 orang dewasa dan satu bayi--berhasil keluar dari badan pesawat dan berupaya menyelamatkan diri menuju area hutan di sekitar bandara. Dalam kondisi darurat itu, Egon dan Baskoro masih sempat mengirimkan sinyal darurat melalui perangkat GPS guna meminta bantuan.

Namun upaya tersebut tidak menyelamatkan keduanya. Dalam keterangan aparat, Egon dan Baskoro tertembak saat berusaha menjauh dari area terbuka bandara. Disebutkan pula bahwa keduanya tertangkap ketika melarikan diri ke hutan dan kemudian dieksekusi oleh pelaku. Keduanya meninggal dunia akibat luka tembak.

Sementara itu, 13 penumpang dilaporkan berhasil bersembunyi dan menyelamatkan diri.



Jenazah pilot dan kopilot pesawat ditembak di Papua dievakuasi. (Dok Satgas Damai Cartenz)

Mereka kemudian dievakuasi setelah aparat menguasai kembali lokasi. "Seluruh penumpang pesawat yang berjumlah 13 orang dipastikan selamat. Mereka merupakan warga lokal yang segera mengamankan diri dan telah kembali ke rumah masing-

masing," ujar Yusuf.

Pasca-penembakan, Satgas Damai Cartenz segera mengerahkan kekuatan tambahan ke lokasi. Sebanyak 20 personel Operasi Damai Cartenz diterjunkan ke Bandara Koroway Batu, dibantu 12 prajurit

Kopasgat TNI Angkatan Udara. Koordinasi juga dilakukan dengan TNI AD untuk pengamanan perimeter bandara dan wilayah sekitar.

"Alhamdulillah, pagi ini pasukan sudah masuk dan mengamankan lokasi termasuk pesawat. Evakuasi korban sudah selesai dilaksanakan. Saat ini kami fokus pada sterilisasi area dan memastikan situasi benar-benar kondusif," kata Yusuf.

Bandara Koroway Batu dinyatakan telah dikuasai aparat. Proses sterilisasi dilakukan untuk memastikan tidak ada lagi potensi ancaman lanjut. Aparat juga melakukan penyisiran di area hutan sekitar bandara yang diduga menjadi lokasi persembunyian pelaku.

Jenazah Egon dan Baskoro dievakuasi ke RSUD Timika untuk penanganan lebih lanjut. Keduanya dijadwalkan diterbangkan ke Jakarta untuk diserahkan kepada keluarga. (wid,ant,ist/dya)

Ikatan Pilot Mendesak Evaluasi Keamanan Penerbangan Papua

DI TENGAH proses penegakan hukum, Ikatan Pilot Indonesia (IPI) mendesak pemerintah bersama Komite Nasional Keselamatan Penerbangan (KNKP) memastikan keamanan dan keselamatan penerbangan di Papua diperketat.

Dewan Kehormatan IPI, Capt. Rama Noya, menilai serangan terhadap pilot sipil bukan sekadar tindak kriminal biasa, melainkan ancaman serius terhadap sistem penerbangan nasional.

"Karena itu, kami mengimbau semua pihak, baik TNI/Polri maupun masyarakat adat Papua, untuk bisa menjaga keselamatan pilot yang telah melakukan pelayanan kepada masyarakat," kata Rama dalam konferensi pers di Bintaro, Kamis (12/2/2026).

Menurut Rama, IPI telah lama mendorong perbaikan sistem keamanan di wilayah berisiko tinggi seperti Papua. Sejumlah kajian dan forum diskusi telah dilakukan, termasuk seminar keamanan penerbangan di Jayapura pada 2022.

"Sudah dilakukan berbagai kajian terhadap keamanan penerbangan di

Ikatan Pilot Indonesia menggelar konferensi pers terkait peristiwa penembakan terhadap pesawat komersial maskapai Smart Air di Bandara Koroway Batu, Distrik Kombai, Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan.(ist)



daerah berisiko tinggi. Seminar di Jayapura tahun 2022 menghasilkan rekomendasi implementasi keamanan penerbangan di Papua," ujarnya.

IPI, kata dia, telah menyampaikan lima rekomendasi kepada pemerintah. Sebagian telah dipenuhi, namun masih ada kekurangan yang perlu diperbaiki. "Kami juga meminta agar ada penanganan yang lebih serius karena kejadian pembunuhan terhadap pilot ini sangat fatal dan kami tidak ingin ini terjadi lagi," tutur Rama.

Ia menekankan bahwa transportasi udara merupakan sektor strategis bagi Indonesia sebagai negara kepulauan. Di Papua, jalur udara menjadi urat nadi distribusi logistik, layanan kesehatan, dan mobilitas warga di wilayah terpencil.

"Kami pilot sipil di sini memberikan pelayanan. Karenanya, kami meminta keamanan kami dapat dijaga. Rekomendasi dari kami juga sudah ada yang dipenuhi oleh pemerintah, tetapi masih ada kekurangan," tegaskan Rama. (wid,ant,rls/dya)

Dugaan Kebocoran Data 58 Juta Siswa Jember SAAT MENKO PMK MEMBANTAH, KOMDIGI JANJI TELUSURI

Isu dugaan kebocoran data pendidikan kembali mengemuka dan menjalar ke dua kementerian sekaligus. Setelah ramai diperbincangkan di media sosial, klaim penjualan 58 juta data pendidikan disebut-sebut terkait dengan sistem pemerintah, termasuk Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti). Pemerintah menyatakan tengah melakukan penelusuran. Namun, sejumlah pejabat membantah ada kebocoran. DPR mengingatkan dampaknya bisa sistemik.

Berdasarkan informasi pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan yang diakses Rabu, 11 Februari 2026, gugatan tersebut terdaftar dengan nomor 19/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL.

Fakta-fakta Masalah Siber

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) melaporkan adanya 3,64 miliar serangan siber (anomali trafik) yang terjadi sepanjang Januari hingga Juli 2025.

Statistik Keamanan Siber 2025

- Total Serangan: BSSN mencatat 3,64 miliar serangan siber pada semester pertama 2025.
- Trafik Anomali: Hingga September 2025, jumlah trafik anomali yang menyasar Indonesia meningkat menjadi 4,4 miliar.
- Serangan Terdeteksi: Laporan dari AwanPintar.id menunjukkan 133,4 juta serangan siber spesifik terdeteksi pada paruh pertama 2025.
- Ancaman Konsumen: Kaspersky mengidentifikasi sekitar 3 juta ancaman siber yang menargetkan pengguna individu di Indonesia pada kuartal pertama 2025.

Daftar Kasus Signifikan (2025-2026)

- Data Pendidikan (Februari 2026): Muncul dugaan kebocoran 58 juta data pendidikan (siswa/mahasiswa) yang diperjualbelikan di DarkWeb. Namun, pemerintah melalui Menko PMK membantah adanya kebocoran tersebut setelah dilakukan pengecekan.
- Data 13 Perguruan Tinggi (Januari 2026): Wamen Komdigi menanggapi laporan dugaan kebocoran data yang berasal dari sistem 13 kampus di Indonesia.
- Rekrutmen PLJP (Februari 2026): Kementerian Komdigi mencopot tiga pejabat menyusul dugaan kebocoran data pelamar pada proses pengadaan Rekrutmen PLJP.



ISU kebocoran data kembali menimpa Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Kali ini, yang dipersoalkan adalah data pelamar kerja dalam proses rekrutmen Pengadaan Jasa Lainnya Perorangan (PJLP). Dugaan kebocoran mencuat setelah tautan pendaftaran lowongan mengarah ke



(Ilustrasi) Keamanan data pribadi di dunia maya menjadi perhatian sejumlah warga. (ist)

Permohonan diajukan pada 10 Februari 2026. Sidang perdana dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 24 Februari 2026, pukul 10.00 WIB.

Perbincangan bermula dari lini

masa media sosial X pada Ahad, 8 Februari 2026. Sebuah akun dengan nama terpotong @bint** mengunggah tangkapan layar yang mengklaim adanya penjualan data pendidikan

Wamen Sebut Ada Indikasi Pelanggaran SOP

folder Google Drive yang dapat diakses publik.

Kasus ini pertama kali diangkat oleh influencer Abil Sudarman melalui media sosial. Ia menyoroti bahwa pelamar diminta mengunggah dokumen pribadi—seperti curriculum vitae (CV), kartu tanda penduduk (KTP), surat lamaran, surat keterangan sehat, transkrip nilai, hingga surat pengalaman kerja--ke dalam folder Google Drive.

Masalahnya, menurut Abil, akses ke folder tersebut tidak dibatasi. Ia mengklaim seluruh berkas milik pelamar lain dapat dibuka oleh siapa pun yang memiliki tautan.

Menanggapi hal itu, Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria mengakui adanya indikasi kesalahan prosedur. "Seharusnya iya (tidak menggunakan Google Drive). Sedang diteliti, kenapa hal ini terjadi? Kecerobohnya ada di mana?" ujar Nezar

Menurut Nezar, kasus tersebut sedang ditangani secara internal oleh Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Ia menyebut dugaan kecerobohan itu terjadi dalam waktu singkat dan segera diperbaiki. "Ini dilakukan secara internal di mana

kesalahannya. Dan kami ketahui kecerobohan itu terjadi dalam waktu yang singkat, lalu langsung ditutup dan diganti ke saluran yang lain dengan menggunakan platform yang lebih aman," katanya.

Sorotan terhadap kasus ini juga muncul di DPR. Anggota Komisi I Nurul Arifin mempertanyakan insiden tersebut dalam rapat dengan Komdigi pada Rabu (4/2). "Pertanyaan saya, yang di jantungnya, yang di rumahnya saja seharusnya bisa memberikan keamanan digital malah kok terjadi kebocoran data seperti ini?" ujarnya.

Nurul juga menyayangkan kabar bahwa akun media sosial Abil, yang pertama kali mengungkap dugaan kebocoran itu, disebut mengalami serangan peretasan.

Hasil investigasi internal kemudian berujung pada pencopotan pejabat.

Inspektor Jenderal Komdigi Arief Tri Hardiyanto menyatakan, berdasarkan pemeriksaan Inspektorat Jenderal, Direktur Jenderal Infrastruktur Digital menonaktifkan tiga pegawai yang diduga terlibat dalam proses pengadaan tersebut. (wid,rls/dya)

oleh pelaku dengan nama samaran "SN1F". Dalam unggahan itu disebutkan bahwa pelaku tidak sekadar menawarkan berkas lama, melainkan akses yang diklaim dapat digunakan untuk menyedot data terbaru langsung dari server pemerintah.

"Pelaku dengan nama samaran 'SN1F' tidak hanya menjual file data lama, melainkan menawarkan jalur khusus yang memungkinkan pembeli untuk menyedot data siswa terbaru secara langsung dari server pemerintah kapan saja," tulis akun tersebut.

Unggahan itu juga menyebut data yang ditawarkan bersifat mutakhir dan terus diperbarui. "Sampel data yang dibagikan menunjukkan tingkat kedalaman informasi yang sangat spesifik," tulisnya lagi. Narasi itu segera menyebar dan memantik kekhawatiran publik, terutama karena menyangkut identitas siswa dan mahasiswa dalam jumlah besar.

Angka yang beredar tidak kecil, 58 juta data. Klaim tersebut memunculkan dugaan bahwa kebocoran tidak hanya menyentuh satu jenjang pendidikan. Di ruang publik, PDDikti—yang memuat data mahasiswa, dosen, dan aktivitas akademik perguruan tinggi—ikut disebut-sebut berpotensi terdampak.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) merespons isu tersebut sehari kemudian. Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Alexander Sabar menyatakan pihaknya melakukan penelusuran awal atas informasi yang beredar.

"Komdigi menanggapi dan menindaklanjuti secara serius isu dugaan kebocoran 58 juta data pendidikan yang tengah beredar di ruang publik," kata Alexander.

Menurut dia, informasi yang beredar memuat dugaan penjualan akses application programming interface (API). Akses semacam itu, jika benar terbuka tanpa pengamanan memadai, berpotensi dimanfaatkan untuk menarik data langsung dari sistem. Komdigi, kata Alexander, telah berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk melakukan investigasi teknis secara menyeluruh dan terkoordinasi. (wid,rls,dya)

Antisipasi Manipulasi, Digitalisasi Angkutan Pelajar Kota Batu Ditarget Tahun Ini

BATU - Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batu mengakui sistem pelaporan manual program Angkutan Pelajar (Apel) Gratis rawan manipulasi. Tahun ini, Dishub menargetkan digitalisasi layanan melalui sistem presensi berbasis global positioning system (GPS).

Kepala Dishub Kota Batu, Susetya Herawan, menjelaskan selama ini, pelaporan kehadiran siswa dan ritase armada hanya mengandalkan dokumentasi foto dari pengemudi.

"Selama ini manual. Hanya menyertakan foto. Skema seperti ini kurang memastikan akurasi data. Ke depan, kami perkuat dengan aplikasi terintegrasi sehingga ritase dan kinerja sopir bisa terpantau setiap hari dalam satu sistem," ujarnya, Kamis (12/2/2026).

Menurut Herawan, data yang akurat menjadi kebutuhan mendesak karena jumlah siswa di setiap jalur Apel Gratis bersifat fluktuatif. Terutama saat pergantian tahun ajaran.

Perubahan tersebut kerap tidak terpetakan secara presisi, sehingga berpotensi membuat rute dan armada

tidak lagi sesuai kebutuhan riil di lapangan.

Ia mencontohkan kondisi di Desa Oro-Oro Ombo, Kecamatan Batu. Pada awal tahun 2025 lalu, jumlah siswa yang dijemput di wilayah tersebut sekitar 30 orang. Namun, saat ini meningkat signifikan hingga mencapai 60 siswa di satu titik jemput, sementara titik lainnya mengalami penurunan.

"Kami perlu pelajari apakah jumlahnya berkurang atau bertambah. Atau hanya bergeser karena rutinya berubah. Data ini harus akurat agar kebijakan yang diambil tidak keliru," kata Herawan.

Perubahan tersebut, lanjutnya, menuntut Dishub melakukan pemetaan ulang rute secara berkala. Dengan data yang lebih presisi, Dishub dapat menentukan apakah perlu penambahan armada atau cukup dengan penyesuaian jalur.

Sebagai solusi, Dishub berencana mengembangkan aplikasi presensi terintegrasi yang dilengkapi fitur pelacakan global positioning system (GPS). Sistem ini nantinya akan

memantau kehadiran siswa sekaligus pergerakan armada secara real time.

Melalui sistem tersebut, Dishub tidak hanya dapat memastikan jumlah siswa yang terlayani di setiap rute, tetapi juga memantau ritase kendaraan serta kinerja pengemudi dalam satu sistem terpusat.

Herawan mengatakan, rencana digitalisasi ini sebenarnya telah disiapkan sejak tahun lalu. Namun, keterbatasan anggaran membuat implementasinya tertunda. Pihaknya kini menargetkan program tersebut dapat direalisasikan tahun 2026 ini, menyesuaikan siklus pendanaan daerah.

Herawan mengaku optimistis penguatan sistem berbasis data dan



Ilustrasi: Dinas Perhubungan Kota Batu mulai melakukan persiapan mapping route Angkutan Pelajar (Apel) Gratis. (dok. Dishub Kota Batu)

teknologi akan meningkatkan profesionalitas serta akuntabilitas layanan Apel Gratis. "Target kami, pelayanan angkutan pelajar semakin tepat sasaran, profesional, dan bisa dipertanggungjawabkan," pungkasnya. (Santi/Dya)

Stunting Kota Malang Ditarget Turun 50 Persen di 2026



Ilustrasi: Posyandu rutin di Puskesmas Cisadea, Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing Kota Malang. (dok. Puskesmas Cisadea)

MALANG - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang menargetkan penurunan angka stunting hingga 50 persen pada tahun 2026 ini melalui strategi New Zero Stunting. Optimisme itu melihat dinamika data prevalensi stunting dalam 3 tahun terakhir, dari 2 metode pendataan berbeda yang menunjukkan tren positif.

"Berdasarkan data bulan timbang, prevalensi stunting di Kota Malang pada 2023 tercatat 9,2 persen, turun menjadi 8,1 persen pada 2024, dan

sedikit naik menjadi 8,48 persen di 2025," ujar Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Kota Malang, Muhammad Zamroni, dikutip pada Kamis (12/2/2026).

Namun, jika mengacu pada hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), Zamroni menyebutkan angka yang muncul menunjukkan tren berbeda. Pada 2023, prevalensi stunting Kota Malang berdasarkan SSGI berada di angka 17,3 persen, kemudian naik menjadi 22,7 persen di 2024.

"Sekarang kebijakan pemerintah pusat, SSGI tidak dilaksanakan setiap tahun tetapi dua tahun sekali. Sehingga untuk 2025 kami tidak memakai SSGI, melainkan laporan bulan timbang yang dilakukan puskesmas dan posyandu melalui e-PPGBM," jelas Zamroni.

Karena tidak ada pelaksanaan SSGI pada 2025, Dinkes Kota Malang

menggunakan data bulan timbang sebagai acuan pemantauan. Dari data tersebut, angka 8,48 persen dinilai masih tergolong kecil dan berada di bawah target nasional yang ditetapkan pemerintah pusat, yakni 14 persen.

Meski demikian, Dinkes tetap menjadikan data SSGI sebagai rujukan utama dalam membaca gambaran besar stunting. Berdasarkan data SSGI 2024 yang berada di angka 22,7 persen, Dinkes Kota Malang menargetkan pada 2026 angka tersebut bisa ditekan hingga 11,7 persen.

"Kami optimistis bisa menuntaskan stunting melalui strategi New Zero Stunting di 2026. Target kami penurunan signifikan hingga 50 persen, pokoknya di bawah 14 persen sesuai target pemerintah pusat," tegasnya.

Lebih lanjut Zamroni mengakui, tantangan penanganan stunting semakin kompleks. Faktor sanitasi, perilaku masyarakat, hingga kondisi ekonomi turut mempengaruhi. Namun ia menekankan penyebab stunting tidak semata-mata karena kemiskinan.

"Yang paling berpengaruh justru

pola asuh. Ini yang sering luput dipahami masyarakat," ujarnya.

Melalui konsep New Zero Stunting, Dinkes Kota Malang menekankan pencegahan sejak dulu agar tidak ada penambahan kasus stunting baru, terutama pada kelompok balita. Program ini menyarankan pendampingan berkelanjutan dan intervensi langsung kepada kelompok berisiko, mulai dari ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita.

Perbedaan utama New Zero Stunting dengan program sebelumnya terletak pada fokus intervensi yang lebih menyentuh langsung sasaran. Tujuannya agar balita yang sudah mengalami stunting tidak kembali berada pada kondisi yang sama.

Penanganan juga difokuskan pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) melalui pemenuhan nutrisi optimal seperti ASI eksklusif, pemberian makanan pendamping ASI kaya protein hewani, serta penerapan perilaku hidup bersih dan sehat.

Selain itu, pemantauan tumbuh kembang dilakukan secara rutin melalui posyandu dan puskesmas, termasuk memastikan kelengkapan imunisasi serta edukasi berkelanjutan kepada orang tua. (Santi/Dya)

ISRAEL RESMI MASUK BOARD OF PEACE, PERJUANGAN RI UNTUK PALESTINA DIUJI

Keputusan Israel bergabung dalam Board of Peace (BoP) bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperluas spektrum perdebatan mengenai arah dan konsistensi diplomasi Indonesia terhadap Palestina. Forum yang diklaim sebagai inisiatif perdamaian global itu sejak awal memantik kontroversi, terutama setelah Indonesia menyatakan diri menjadi salah satu dari 26 negara yang menyetujui draf pembentukannya. Kini, dengan masuknya Israel, posisi Indonesia berada dalam sorotan yang lebih tajam.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan penandatanganan aksesi negaranya ke BoP pada Rabu (11/2/2026) waktu setempat, seusai bertemu Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio di Blair House dan menjelang pertemuan dengan Presiden Trump di Gedung Putih. Pengumuman itu disampaikan melalui akun resminya di platform X.

Masuknya Israel ke dalam BoP terjadi dalam konteks yang belum sepenuhnya stabil di Gaza. Pada 9 Februari 2026, Kementerian Kesehatan Palestina melaporkan tiga warga Gaza tewas akibat serangan Israel. Peristiwa itu terjadi di tengah periode gencatan senjata yang telah berlangsung sekitar



Sebuah kantor polisi juga diserang di Kota Gaza, kata pemerintah setempat, menewaskan sedikitnya 12 orang. (Dok)

tiga bulan antara kedua pihak. Fakta tersebut menambah keraguan sebagian kalangan terhadap efektivitas forum yang mengusung nama "perdamaian", namun diikuti aktor yang masih terlibat

dalam operasi militer aktif.

Indonesia sendiri menandatangani piagam keanggotaan BoP pada 22 Januari 2026 di sela World Economic Forum (WEF) di Davos,

Tepi Barat Terus Digempur, Abbas Desak Trump Bertindak



Warga Palestina melakukan protes setelah tentara Israel memblokir pintu masuk kamp pengungsitan Nur Shams di Tepi Barat yang diduduki pada hari Senin. (dok)

KETEGANGAN di wilayah Palestina kembali meningkat. Di tengah gencatan senjata yang diklaim masih berlaku sejak Oktober 2025, militer Israel dilaporkan melanjutkan serangan di Jalur Gaza serta melakukan gelombang penangkapan di Tepi Barat. Situasi ini memicu kecaman dari Presiden Palestina Mahmoud Abbas yang mendesak Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengambil sikap tegas.

Bericara seusai pertemuannya dengan Perdana Menteri Norwegia Jonas Gahr Store di Oslo, Rabu (11/2/2026), Abbas menilai langkah terbaru Israel memperkuat kendali

dan memperluas penjajahan di Tepi Barat sebagai pelanggaran serius hukum internasional. Ia menyebut kebijakan tersebut menghambat upaya perdamaian yang tengah diupayakan Washington.

"Pelanggaran-pelanggaran serius ini membutuhkan tanggapan tegas dari pemerintahan AS dan komunitas internasional karena menghambat upaya Presiden Trump dan merupakan pelanggaran hukum internasional," ujar Abbas.

Selain membahas ekspansi permukiman dan kontrol keamanan Israel, Abbas juga menyoroti kekerasan yang dilakukan pemukim Yahudi serta pembekuan dana sekitar 4 miliar dolar AS oleh Tel Aviv yang diperuntukkan bagi rakyat Palestina. Menurutnya, tekanan finansial dan keamanan yang terus meningkat membuat posisi Otoritas Palestina semakin terjepit.

Kecaman juga datang dari Komisaris Tinggi PBB untuk Hak

Asasi Manusia, Volker Turk. Ia menilai keputusan kabinet keamanan Israel merupakan langkah sistematis yang berpotensi meniadakan peluang berdirinya negara Palestina yang layak.

"Ini adalah langkah lain oleh otoritas Israel untuk membuat negara Palestina yang layak menjadi tidak mungkin, yang melanggar hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri," kata Turk dalam pernyataan terpisah.

Di lapangan, situasi tak kalah memanas. Di Jalur Gaza bagian selatan, sedikitnya tiga warga Palestina--termasuk dua anak dan seorang perempuan--dilaporkan terluka akibat tembakan militer Israel di wilayah El-Meslah. Sumber kesehatan setempat menyebut tembakan diarahkan ke tenda-tenda pengungsian. Para korban kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Nasser di Khan Younis.

Serangan udara juga dilaporkan terjadi di wilayah timur Khan Younis, sementara artilleri berat menghantam kawasan barat Rafah. Di Gaza utara, wilayah timur Kamp Jabalia turut dibombardir. Hingga kini belum ada laporan resmi mengenai kemungkinan korban jiwa tambahan.(rtr;ist/dya)

DAFTAR ANGGOTA DAN PENGURUS BOARD OF PEACE: DEWAN EKSEKUTIF (PIMPINAN)

Dewan ini dipimpin langsung oleh Donald Trump sebagai Ketua Seumur Hidup. Anggota dewan eksekutif lainnya meliputi:

- Nickolay Mladenov: Perwakilan Tinggi untuk Gaza.
- Marco Rubio: Menteri Luar Negeri Amerika Serikat.
- Jared Kushner: Menantu Donald Trump.
- Steve Witkoff: Utusan Khusus AS untuk Timur Tengah.
- Tony Blair: Mantan Perdana Menteri Britania Raya.
- Ajay Banga: Presiden Bank Dunia.
- Marc Rowan: CEO Apollo Global Management.
- Robert Gabriel Jr.: Penasihat Politik Amerika Serikat.

Negara Anggota

Terdapat sedikitnya 26 negara yang telah bergabung sebagai anggota pendiri. Israel secara resmi bergabung pada 12 Februari 2026 melalui penandatanganan oleh PM Benjamin Netanyahu.



Swiss. Presiden Prabowo Subianto hadir langsung dalam penandatanganan tersebut. Sebelum pembentukan resmi, Trump disebut mengirimkan surat kepada 60 negara berisi gagasan pembentukan forum perdamaian dunia.

Namun, hanya 26 negara yang akhirnya menyatakan kesediaan bergabung, termasuk Indonesia. Sejumlah negara sekutu AS, seperti Inggris, memilih tidak ikut serta dengan alasan perbedaan pandangan atas konsep organisasi yang dinilai terlalu didominasi Washington. Malaysia secara tegas menolak, sementara Singapura menyatakan masih mempertimbangkan.

Di dalam negeri, respons terhadap keanggotaan Indonesia di BoP terbelah. Aqsa Working Group (AWG) menjadi salah satu kelompok yang menyatakan penolakan terbuka. Dalam pesan berantai yang beredar di WhatsApp, AWG mengajak masyarakat mengikuti aksi bertajuk "Sambut Ramadhan 1447 H, Satukan Shaf Lindungi Al-Aqsa dan Palestina" yang digelar di depan Kedutaan Besar Palestina hingga Kedutaan Besar AS pada Jumat (13/2/2026).

Salah satu tuntutan utama adalah penolakan terhadap keikutsertaan Indonesia di BoP.

Ketua Presidium AWG, Muhammad Anshorullah, menyampaikan sembilan alasan penolakan terhadap forum tersebut. Ia menilai BoP dikendalikan oleh Dewan Eksekutif dari pemerintah AS dan merupakan instrumen geopolitik.(gus,ist,ana/dya)

JAGA KESEHATAN OTAK, LAKUKAN KEBIASAAN PAGI INI

Cara seseorang mengawali pagi hari ternyata memiliki pengaruh besar terhadap kesehatan otak dalam jangka panjang. Sebagian orang mungkin terbiasa langsung mengulir media sosial sambil sarapan, sementara yang lain memilih bergerak aktif meski hanya sebentar.

Pilihan-pilihan sederhana ini, bila dilakukan secara konsisten, dapat berdampak pada ketajaman daya ingat, fokus, hingga kewaspadaan seiring bertambahnya usia.

Penurunan fungsi kognitif ringan memang dianggap wajar sebagai bagian dari proses penuaan. Namun, para ahli menilai bahwa rutinitas harian yang mendukung kerja otak dan tubuh dapat membantu menjaga kejernihan mental tetap optimal.

"Kejernihan mental bukan hanya tentang teka-teki atau suplemen, tetapi dimulai dari rutinitas sehari-hari yang mendukung otak dan tubuh," tutur direktur WeNatal Nutrition, Lisa Dreher, dikutip dari Good

Housekeeping. Senada dengan itu, ahli biologi manusia sekaligus pendiri The Ultimate Human, Gary Brecka, menegaskan bahwa kebiasaan pagi hari memegang peran krusial.

Minum air putih setelah bangun tidur

Kebiasaan minum air menjadi langkah awal yang sederhana namun penting. Asupan cairan membantu tubuh dan otak kembali bekerja secara optimal setelah berjam-jam beristirahat. "Kekurangan cairan ringan saja sudah dapat memengaruhi suasana hati, perhatian, dan daya ingat. Asupan air di pagi hari juga membantu mengurangi 'kabut otak' serta mendukung fungsi kognitif yang lebih tajam," tutur Brecka.

Paparan sinar matahari

Menikmati paparan sinar matahari pagi dalam 10-30 menit pertama setelah bangun tidur menjadi tips lain. Paparan sinar matahari berperan besar dalam menyelaraskan ritme sirkadian. "Cahaya matahari di pagi hari menambatkan ritme sirkadianmu, meningkatkan serotonin, dopamin, dan mempersiapkan otak untuk kewaspadaan sepanjang hari," ujar Brecka.

Melakukan gerakan ringan

Gerakan ringan saat pagi seperti berjalan santai, peregangan, atau latihan mobilitas singkat juga dianjurkan. Aktivitas ini membantu melancarkan aliran darah ke otak. "Gerakan ringan di pagi hari dapat meningkatkan memori kerja dan pengaturan suasana hati," kata Dreher. Dengan demikian, manfaat olahraga pagi tidak hanya dirasakan oleh tubuh, tetapi juga performa kognitif.

Makan makanan yang tinggi protein

Dari sisi asupan sarapan tinggi protein dinilai penting untuk menjaga kestabilan energi dan fokus. Protein menyediakan asam amino yang dibutuhkan untuk membentuk neurotransmitter. "Protein penting untuk fokus, motivasi, dan stabilitas suasana hati. Ini juga mencegah penurunan energi di pertengahan pagi yang dapat membuatmu merasa 'berkabut'," terang Dreher.

Melakukan meditasi

Para ahli juga menyoroti manfaat meditasi, journaling, atau melatih rasa syukur di pagi hari. Praktik ini

membantu mengelola stres dan emosi sejak awal. "Kesadaran (mindfulness) secara harfiah mengubah kimia otakmu, yang dapat meningkatkan dopamin dan serotonin," ucap Brecka. Kebiasaan ini dinilai mendukung pengambilan keputusan dan kestabilan emosi sepanjang hari.

Latihan pernapasan

Tak kalah penting, latihan pernapasan terkontrol dapat membantu menenangkan sistem saraf sekaligus meningkatkan suplai oksigen ke otak. Brecka menjelaskan, pernapasan dalam mengoksidasi otak dan mengatur kortisol, sehingga menciptakan apa yang disebut dengan "ketenangan yang waspada". Kondisi ini membuat tubuh tetap tenang tanpa kehilangan fokus.

Mandi air dingin

Beberapa orang juga memilih paparan suhu dingin, seperti mandi air dingin, sebagai stimulan pagi. Menurut Brecka, kebiasaan ini dapat membantu mengurangi perera dan gangguan, meningkatkan kewaspadaan, dan memperbaiki kejernihan mental. Berinteraksi dengan lingkungan

sekitar di sisi sosial, interaksi langsung di pagi hari, misalnya mengobrol dengan pasangan atau orangtua tanpa gangguan layer dinilai lebih bermanfaat bagi otak dibanding langsung terpapar gawai.

"Bukti terkuat untuk mengurangi penurunan kognitif berasal dari keterlibatan sosial. Interaksi tatap muka di pagi hari mengaktifkan jaringan saraf yang tidak dapat direplikasi oleh waktu layar," tutur Brecka.

Sebaliknya, para ahli menyarankan untuk menghindari paparan stresor sejak pagi, termasuk berita atau informasi yang memicu kecemasan. Apa yang pertama kali dikonsumsi otak diyakini memengaruhi kondisi mental sepanjang hari. "Aktivitas pusat ketakutan otak di pagi hari dapat membuat lebih sulit untuk fokus, tetap tenang, dan mengatur emosimu," kata Dreher.

Dengan membangun kebiasaan pagi yang lebih sadar dan sehat, para ahli menilai seseorang dapat memberi fondasi kuat bagi kesehatan otak, sekaligus meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. (Inna-UINSA berkontribusi dalam tulisan ini)



Olahraga Ringan



Berjemur Pagi



Meditasi



Latihan Pernafasan



Apa Itu Iridium yang Lebih Mahal dari Emas?



Selain emas, sebenarnya ada beberapa material yang nilainya tidak kalah tinggi, bahkan lebih mahal. Salah satunya adalah iridium, logam langka yang belakangan ini semakin sering dibicarakan karena harganya yang melampui emas.

Dalam beberapa tahun terakhir, iridium kerap dibandingkan dengan emas karena karakteristiknya yang sama-sama langka, tahan lama, dan bernilai tinggi.

Namun, berbeda dengan emas yang umum dikenal sebagai instrumen investasi, iridium lebih banyak dimanfaatkan dalam bidang industri dan teknologi.

Iridium adalah unsur kimia dengan nomor 77 dan diklasifikasikan sebagai logam transisi. Pada suhu ruang, iridium berwujud padat dengan warna putih. Nama iridium berasal dari kata Yunani Iris yang berarti pelangi, merujuk pada warna-warna cerah yang muncul pada senyawa kimianya.

Menurut Royal Society of Chemistry. Seperti emas, iridium cukup tidak reaktif dan memiliki kepadatan serta titik leleh yang sangat tinggi. Bahkan iridium adalah unsur yang paling tahan korosi dalam tabel periodik.

Iridium pertama kali diidentifikasi pada awal abad ke-19. Ahli kimia Inggris Smithson Tennant secara luas diakui sebagai penemu unsur ini pada tahun 1803.

Namun, sejumlah ilmuwan Prancis seperti H.V. Collet-Desvotils, A.F. Fourcroy, dan N.L. Vauquelin juga diduga menemukan iridium secara terpisah dalam penelitian mereka terhadap bijih platinum.

Iridium ditemukan ketika platinum dilarutkan menggunakan aqua regia, campuran asam nitrat dan asam klorida yang sangat kuat. Dari sisi larutan yang tidak larut itulah, iridium berhasil diidentifikasi sebagai unsur baru.

Kegunaan Iridium

Karena sangat langka dan sulit diperoleh dalam bentuk murni, iridium jarang digunakan secara langsung.

Bahkan, iridium murni hampir tidak pernah ditemukan di alam. Bijih yang mengandung iridium umumnya hanya memiliki kandungan dalam jumlah sangat kecil dan ditemukan di wilayah seperti Afrika Selatan, Alaska, Brazil, Myanmar, dan Rusia.

Dalam praktiknya, iridium biasanya dicampur dengan platinum untuk membentuk paduan logam dengan kandungan iridium sekitar 5-10%. Paduan ini dimanfaatkan untuk berbagai keperluan penting, seperti perhiasan, ujung pena, peralatan bedah, hingga komponen kontak listrik menurut Britannica.

Pada April 2025, harga iridium

tercatat pernah menembus lebih dari Rp 3 juta per gram, sementara harga emas berada di kisaran Rp 1,9 juta hingga Rp 2 juta per gram. Ini menunjukkan harga iridium lebih mahal dari emas.

Tingginya harga iridium disebabkan oleh dua faktor utama, yakni kelangkaan dan meningkatnya permintaan industri, khususnya di sektor teknologi dan manufaktur presisi. Faktor tersebut yang menyebabkan iridium memiliki harga yang lebih tinggi dari emas, terutama karena ketersediaannya yang jauh lebih langka serta proses penambangan dan pemurniannya yang lebih kompleks. (Nabilla - UINSA Berkontribusi dalam tulisan ini)



HARIAN
LENTERA
Inspirasi Perubahan TODAY

BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO | **GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) | **MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH | **LAMONGAN:** L HANDI | **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA | **KEDIRI:** GATOT SUNARKO | **JOMBANG:** SUTONO | **PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO:** IMAN SANTOSO | **BONDOWOSO-SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO | **MADIUN:** WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) | **ISKANDAR Z. I MADURA RAYA:** SAHLAN KURNIAWAN | **TRENGALEK:** TINA W I NGAWI: DIMAS RIDHO SURYO BASKORO | **DKI JAKARTA:** FUAD HASSAN | **LOMBOK BARAT:** MUHAYYAN | **PALANGKA RAYA:** NOVITA MASNIARI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH | MARKETING COMMUNICATION JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN | SEKERTARIS FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILAH DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN | ALAMAT REDAKSI JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26 | TELP 031-87854491 | PENERBIT PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA | ALAMAT PERCETAKAN SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA | TELP IKLAN 031-87854491 | NIB 91205006801134 | HARGA IKLAN RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal kewartawanan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal kewartawanan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



MEDIA TERVERIFIKASI



MEMAKAI SUNSCREEN SAAT MUSIM HUJAN PENTING, KENAPA?

Musim hujan yang datang hampir sepanjang tahun di sejumlah wilayah Indonesia sering kali membuat masyarakat merasa aman dari paparan sinar matahari.

Langit yang mendung, cuaca yang sejuk, serta hujan yang turun silih berganti sering kali menimbulkan anggapan bahwa penggunaan sunscreen atau tabir surya tidak lagi diperlukan.

Banyak orang merasa paparan sinar matahari tidak terlalu kuat saat kondisi cuaca seperti ini, sehingga perlindungan kulit dianggap bisa diabaikan. Padahal, anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar.

Para ahli kesehatan kulit justru menegaskan bahwa sunscreen tetap menjadi perlindungan penting bagi kulit, meskipun matahari tidak terlihat secara langsung.

Awan dan kabut memang dapat mengurangi intensitas cahaya yang tampak oleh mata, namun tidak sepenuhnya menghalangi radiasi ultraviolet.

Sinar UV tetap dapat menembus lapisan awan dan mencapai permukaan kulit tanpa disadari. Inilah yang sering membuat banyak orang mengalami kerusakan kulit meski merasa tidak sedang terpapar sinar matahari secara langsung.

Penggunaan sunscreen merupakan langkah preventif yang ditujukan untuk melindungi kulit dari paparan sinar ultraviolet atau UV setiap hari, baik saat cuaca cerah maupun mendung. Sinar UV sendiri terdiri dari dua jenis utama, yaitu UVA dan UVB. Kedua jenis sinar ini memiliki dampak yang berbeda, namun sama-sama berbahaya bagi kesehatan kulit apabila terpapar secara terus-menerus.

tanpa perlindungan.

UVA dikenal mampu menembus lapisan kulit lebih dalam dan berperan besar dalam proses penuaan dini, seperti munculnya keriput, garis halus, serta flek hitam.

Paparan UVA juga dapat merusak kolagen dan elastin yang menjaga kekenyalan kulit, sehingga kulit tampak lebih cepat kendur dan kusam. Karena sifatnya yang konsisten sepanjang tahun, bahkan saat cuaca mendung sekalipun, perlindungan terhadap UVA menjadi hal yang sangat penting dalam rutinitas perawatan kulit harian.

UVB berkontribusi terhadap terjadinya sunburn atau kulit terbakar. Yang sering tidak disadari, sinar UVA tetap dapat menembus awan tebal dan kaca, sehingga keberadaannya tidak sepenuhnya hilang saat cuaca mendung atau hujan.

Semua orang tanpa terkecuali sebenarnya perlu menggunakan sunscreen, baik perempuan maupun laki-laki dari berbagai kelompok usia. Terutama bagi mereka yang melakukan aktivitas di luar ruangan, seperti bekerja, bersekolah, atau sekadar berpergian. Banyak orang mengira sunscreen hanya perlu dipakai saat cuaca panas dan matahari terik.

Meskipun sedang musim hujan dan langit terlihat mendung, penggunaan sunscreen tetap perlu untuk kesehatan kulit. Berikut lima alasan kenapa kita sebaiknya tetap memakai sunscreen meski hujan turun hampir setiap hari.

Sinar UV tetap menembus awan

Awan tidak sepenuhnya menghalangi sinar ultraviolet, sekitar 80% sinar UV masih menembus awan

dan dapat merusak kulit. Risiko kerusakan kulit akibat sinar UV ada meski matahari tidak terlihat.

Mencegah penuaan dini

Paparan sinar UV secara terus-menerus dapat menyebabkan penuaan dini seperti keriput, flek hitam, dan kulit kendur. Sunscreen membantu melindungi kulit dari efek ini, sehingga kulit tetap sehat dan tampak awet muda meskipun cuaca sedang mendung.

Melindungi dari risiko kanker kulit

Selain berdampak pada penampilan, sinar UV adalah salah satu penyebab utama kanker kulit. Dengan rutin menggunakan sunscreen setiap hari, termasuk saat musim hujan, kamu membantu menurunkan risiko kerusakan sel kulit yang berbahaya dalam jangka panjang.

Aktivitas luar ruangan tetap ada

Musim hujan bukan berarti sepenuhnya berada di dalam ruangan. Pergi bekerja, kuliah, atau sekadar keluar rumah tetap membuat kulit terpapar sinar UV. Sunscreen menjadi perlindungan penting meski durasi terpapar dalam waktu singkat.

Menjaga warna kulit tetap merata

Penggunaan sunscreen secara rutin juga membantu menjaga warna kulit tetap merata dan terlindungi dari perubahan warna yang tidak diinginkan. Paparan sinar matahari yang terjadi terus-menerus dapat memicu hiperpigmentasi, yaitu kondisi ketika produksi melanin meningkat sehingga muncul noda hitam atau area kulit yang lebih gelap. Jika dibiarkan tanpa perlindungan, kondisi ini dapat

membuat warna kulit tampak tidak merata dan kusam. (Nabilla - UINSA, berkontribusi dalam tulisan ini)

Tips aplikasi sunscreen yang efektif selama musim hujan

Pilih Produk Waterproof (Tahan Air):

Gunakan sunscreen yang berlabel waterproof atau water-resistant agar perlindungan tidak luntur saat terkena hujan atau kelembaban udara yang tinggi.

Gunakan Tekstur Ringan:

Saat udara lembap, pilih formula berbasis gel atau water-based yang bersifat non-comedogenic agar kulit tidak terasa lengket atau berminyak.

Tetap Gunakan Takaran Dua Ruas Jari:

Jangan mengurangi takaran meskipun cuaca dingin. Aplikasikan sebanyak dua ruas jari untuk seluruh wajah dan leher guna memastikan perlindungan maksimal terhadap risiko penuaan dini dan flek hitam.

Wajib Reapply Berkala:

Sinar UVA penyebab penuaan tetap stabil sepanjang hari. Lakukan aplikasi ulang (reapply) setiap 2-3 jam sekali, terutama jika Anda banyak beraktivitas di luar ruangan atau setelah wajah terkena air hujan.

Dekati Musim Haji, ...dari hal 1

Proses pemisahan urusan haji dan umrah dari Kementerian Agama (Kemenag) ke Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) belum sepenuhnya berjalan mulus. Di tengah konsolidasi kelembagaan yang masih berlangsung, persoalan mendasar mencuat yaitu gaji sejumlah aparatur sipil negara (ASN) yang telah dialihkan ke Kemenhaj tertunda hingga dua bulan.

Isu ini mengemuka dalam rapat kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Haji dan Umrah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/2/2026). Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid mengungkapkan adanya laporan dari daerah, termasuk Kutai Barat, mengenai pegawai yang belum menerima haknya sejak mutasi dilakukan.

"Pak Menteri, Gus Menteri, saya dapat laporan dari Kutai ya, itu petugas atau pegawai yang pindah di Kementerian Haji sampai sekarang itu belum dapat gaji, sampai menjual sepeda motor untuk kebutuhan keluarga," kata Wachid dalam forum tersebut.

Menurut dia, persoalan tersebut tidak bisa dipandang sebagai sekadar kendala administratif. Keterlambatan pembayaran gaji berdampak langsung pada keberlangsungan hidup pegawai dan keluarganya, terutama bagi ASN di daerah yang sepenuhnya bergantung pada penghasilan bulanan.

Wachid meminta pemerintah segera membereskan hambatan birokrasi yang menghambat pencairan gaji dan menekankan pentingnya koordinasi intensif antara Kemenhaj dan Kemenag agar proses transisi tidak menimbulkan korban administratif.

Sorotan serupa datang dari Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Fraksi PDIP, Abidin Fikri. Ia menilai penanganan masalah ini harus dilakukan secara cepat dan terukur.

"Ini memang harus cepat, Pak Wamen, Pak Menteri, karena ini menyangkut kehidupan mereka, sampai jual motor," ujar Abidin.

Komisi VIII bahkan berencana menggelar rapat gabungan dengan melibatkan Kementerian Haji dan Umrah, Kementerian Agama, serta Badan Kepegawaian Negara (BKN) guna memastikan hambatan serupa tidak berulang.

Kendala SKPP

Menanggapi kritik DPR, Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengakui adanya kendala teknis dalam pembayaran gaji bagi pegawai yang baru dimutasi. Ia menjelaskan, persoalan utama terletak pada belum terbitnya Surat Keterangan Penghentian Pembayaran

(SKPP) dari instansi asal.

"Ini dia sudah pindah Pak, ke Kementerian Haji dan Umrah, tapi SKPP-nya dari kementerian asal itu belum keluar. Akibatnya apa, bendahara negara itu tidak membayarkan gajinya, Pak," ujar Dahnil.

Dalam sistem administrasi kepegawaian dan penganggaran negara, SKPP menjadi dokumen kunci untuk menghentikan pembayaran gaji di instansi lama sekaligus menjadi dasar pembayaran di instansi baru. Tanpa dokumen tersebut, bendahara negara tidak dapat memproses pencairan gaji karena berpotensi menimbulkan duplikasi pembayaran.

Dahnil mencontohkan kasus ASN di Kutai Barat yang telah resmi berpindah ke Kemenhaj, namun belum menerima gaji selama dua bulan karena SKPP belum terbit. Ia menyebut kondisi tersebut tidak adil bagi pegawai.

"Kan kami bilang ini zalim kalau begini, hak dua bulan gaji," kata Dahnil.

Ia menegaskan, Kemenhaj terus berupaya mempercepat penyelesaian dokumen agar pembayaran dapat segera dilakukan. Menurutnya, dinamika transisi kelembagaan yang relatif cepat sejak Kemenhaj diresmikan pada September 2025 menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kesiapan administrasi di lapangan.

Kemenag: Gaji Januari Dibayar

Di sisi lain, Kemenag membantah tuduhan adanya praktik pungutan liar dalam proses penerbitan SKPP. Sekretaris Jenderal Kemenag Kamaruddin Amin menegaskan pihaknya telah menunaikan kewajiban pembayaran gaji bagi pegawai yang dialihkan hingga Januari 2026.

"Tidak ada pungli (pungutan liar-red) dalam proses usul penerbitan SKPP. Kemenag sepenuhnya mendukung transisi SDM (Sumber Daya Manusia) dari Kemenag ke Kemenhaj. Hanya, dinamika di lapangan memang ada kendala terkait penerbitan SK Pengangkatan dari Kemenhaj," tegas Kamaruddin di Jakarta, Kamis (12/2/2026).

Menurut dia, keterlambatan SKPP terjadi karena Surat Keputusan (SK) Pengangkatan dari Kemenhaj belum terbit di sejumlah daerah. Padahal, SK pengangkatan tersebut merupakan syarat administratif untuk memproses penerbitan SKPP.

Penjelasan lebih teknis disampaikan Kepala Biro Keuangan Kemenag Ahmad Hidayatullah. Ia menyebut pengusulan SKPP seharusnya sudah rampung pada 10 Januari 2026 agar gaji Februari dapat langsung dibayarkan oleh Kemenhaj. Namun hingga tengat tersebut, berkas dari Kemenhaj belum lengkap di banyak wilayah.

"Fakta di lapangan, sampai batas akhir 10 Januari 2026, jajaran

Kemenhaj di daerah belum bisa menunjukkan dokumen yang diperlukan untuk persyaratan pengusulan SKPP dimaksud. Padahal SK pengangkatan Kemenhaj menjadi syarat penerbitan SKPP," ujar Ahmad.

Akibat keterlambatan itu, sebagian SKPP belum terbit dan pembayaran gaji Februari tidak dapat diproses tepat waktu. Untuk mencegah keterlambatan lebih jauh, Kemenag menerbitkan Surat Sekjen Nomor B-0116/SJ/B.III.1/KU.00.1/01/2026 tertanggal 14 Januari 2026. Melalui kebijakan tersebut, gaji Januari tetap dibayarkan oleh Kemenag, sementara gaji Februari diarahkan menjadi tanggung jawab Kemenhaj.

Ahmad menambahkan, pengurusan SKPP terus diproses berdasarkan dokumen yang tersedia, dan sebagian besar pengajuan ke Kementerian Keuangan telah dirampungkan.

Polemik gaji tertunda terjadi di tengah proses konsolidasi sumber daya manusia Kemenhaj. Hingga kini, sebanyak 3.631 pegawai telah dialihkan ke kementerian baru tersebut. Rinciannya, 33 orang berasal dari Badan Penyelenggara Haji, 3.515 orang dari Kemenag, dan 36 orang dari Kementerian Kesehatan. Selain itu, terdapat 47 pegawai yang dialihkan melalui mekanisme penugasan dari kementerian dan lembaga lain. (wid,kum,rls,ist/dya)

Ada Usulan Pangkas Kewenangan Dewas Badan Pengelola Keuangan Haji

ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, mengusulkan agar kewenangan Dewan Pengawas (Dewas) Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) difokuskan semata pada fungsi pengawasan. Ia menilai, sejumlah kewenangan yang saat ini dimiliki Dewas berpotensi memperlambat proses pengambilan keputusan di tubuh BPKH karena dinilai telah masuk ke ranah eksekutif.

Pandangan tersebut disampaikan Saleh dalam rapat dengar pendapat (RDP) Baleg DPR bersama Kementerian Haji dan Umrah, BPKH, serta Dewas BPKH di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/2/2026). Dalam forum itu, ia menyoroti adanya tugas-tugas Dewas yang menurutnya tidak lagi murni bersifat pengawasan, melainkan sudah menyentuh aspek operasional.

Menurut Saleh, dari paparan yang disampaikan Ketua Dewas BPKH, terlihat ada beberapa kewenangan yang cenderung

eksekutif. "Dari penjelasan Pak Kepala Dewas tadi, kelihatannya memang ada beberapa aspek tugas Dewas yang sifatnya bukan lagi pengawasan, tetapi lebih ke eksekutif," ujarnya.

Ia mencontohkan kewenangan Dewas dalam memberikan persetujuan terhadap rencana strategis (renstra), rencana kerja dan anggaran (RKA), hingga keputusan penempatan investasi. Kewenangan tersebut dinilai terlalu luas dan berpotensi menghambat fleksibilitas BPKH sebagai badan pelaksana.

Saleh menyatakan tidak keberatan jika jumlah anggota Dewas ditambah untuk memperkuat fungsi kontrol. Namun, ia menekankan agar kewenangannya ditertibkan. "Saya setuju kalau jumlah anggota Dewas ditambah, tetapi kewenangannya harus dirapikan. Jangan sampai ikut masuk ke wilayah eksekutif pengelolaan keuangan," katanya.

Ia berpandangan bahwa persetujuan atas renstra dan rencana kerja anggaran seharusnya tidak lagi

menjadi kewenangan Dewas. Apalagi, dokumen tersebut juga secara berkala disampaikan kepada DPR sebagai bagian dari fungsi pengawasan parlemen. Jika semua kewenangan strategis berada di Dewas, menurutnya, fungsi pengawasan DPR menjadi tidak optimal.

"Renstra dan rencana kerja itu kan juga disampaikan ke DPR. Kalau semua kewenangan diambil Dewas, lalu DPR ini perannya apa? Kita dipilih rakyat untuk mengawasi, dan yang diawasi ini uang rakyat, uang jemaah," tegas politikus PAN tersebut.

Hal serupa juga disampaikan terkait kewenangan persetujuan penempatan investasi. Saleh menilai Dewas cukup memastikan bahwa investasi dilakukan secara benar, aman, dan tidak terjadi praktik penyimpangan. Namun, keputusan boleh atau tidaknya suatu investasi, menurutnya, sebaiknya menjadi kewenangan badan pelaksana. (tin,rls,dya)

Dugaan Korupsi Dana Hibah Pokir DPRD Jatim

KHOFIFAH BANTAH TERIMA FEE, NGAKU BARU KENAL KUSNADI SAAT JADI KETUA

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa membantah menerima ijon atau fee sebesar 30 persen dari pengajuan dana hibah pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD Jawa Timur periode 2019–2024. Dalam sidang pemeriksaan saksi di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Kamis (12/2/2026), ia juga menyatakan tidak mengenal mantan Ketua DPRD Jatim, Kusnadi, sebelum yang bersangkutan menjabat pimpinan legislatif.

Sidang yang digelar di ruang utama PN Tipikor Surabaya itu berlangsung dalam pengamanan ketat dan menarik perhatian publik. Sejumlah pendukung Khofifah tampak hadir sejak pagi. Perkara ini merupakan pengembangan dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Wakil Ketua DPRD Jatim 2019–2024, Sahat Tua Simanjuntak, pada Desember 2022.

Dalam pengembangan penyidikan, KPK menetapkan 21 tersangka, salah satunya Kusnadi, yang meninggal dunia pada 16 Desember 2025 karena sakit.

Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengonfirmasi sejumlah keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kusnadi. Dalam dokumen tersebut, disebutkan adanya pembagian persentase dana hibah kepada sejumlah pihak, termasuk gubernur dan wakil gubernur.

"Kami ingin menegaskan yang mulia, bahwa itu tidak benar. Tidak ada dan tidak benar," kata Khofifah di hadapan majelis hakim, menanggapi tuduhan bahwa dirinya dan Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak menerima ijon sebesar 30 persen dari



Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa saat menjalani sidang sebagai saksi dugaan korupsi dana hibah Pokok Pikiran (Pokir) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jatim 2019 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya, Kamis (12/2/2026). (ANTARA)

pengajuan hibah pokir DPRD Jatim.

Jaksa kemudian menyinggung dugaan pembagian dana hibah pokir tahun 2020 sebesar Rp 2,8 triliun di lingkungan pimpinan dan anggota DPRD Jatim. Anggaran itu disebut diperuntukkan bagi lebih dari 100 anggota dewan untuk menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan masing-masing.

"Tidak ada pembagian-pembagian begitu," ucap Khofifah.

Dalam BAP Kusnadi, selain Khofifah dan Emil, sejumlah pejabat lain juga disebut menerima bagian antara 3 hingga 10 persen, di

antaranya Sekretaris Daerah, kepala Bappeda, kepala BPKAD, hingga kepala organisasi perangkat daerah (OPD). Menanggapi rincian angka tersebut, Khofifah mempertanyakan konteks penyampaian keterangan almarhum Kusnadi.

"Saya rasa ini angka secara matematis barangkali saat dilihat dalam suasana seperti apa penjelasan ini disampaikan almarhum. Makanya saya juga mempertanyakan ini," tuturnya. Selain membantah soal ijon, Khofifah juga menegaskan bahwa ia tidak memiliki hubungan personal dengan Kusnadi sebelum menjabat

FAKTA-FAKTA KUNCI HINGGA FEBRUARI 2026:

- **Tersangka dan Vonis Utama:** Sahat Tua Simanjuntak telah divonis 9 tahun penjara dan denda Rp1 miliar serta diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp39,5 miliar pada September 2023.
- **Pengembangan Kasus (21 Tersangka):** KPK mengembangkan kasus ini dan menetapkan total 21 orang tersangka baru. Rinciannya meliputi 4 penerima suap (penyelenggara negara) dan 17 pemberi suap (pihak swasta dan penyelenggara negara).
- **Modus Operandi:** Para oknum anggota DPRD diduga melakukan "ijon" atau kesepakatan awal untuk memotong dana hibah yang diterima masyarakat sebesar 30% hingga 45%. Akibatnya, masyarakat hanya menerima sekitar 55-70% dari total anggaran yang diajukan.
- **Nilai Anggaran Fantastis:** Berdasarkan data KPK, total realisasi belanja hibah APBD Pemprov Jatim pada tahun 2020-2021 mencapai sekitar Rp7,8 triliun yang disalurkan ke berbagai badan, lembaga, dan ormas.
- **Keterangan Saksi Terbaru (Februari 2026):** Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, hadir sebagai saksi dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya pada 12 Februari 2026. Dalam kesaksiannya, Khofifah membantah terlibat atau menerima fee terkait aliran dana hibah tersebut.



Ketua DPRD Jatim. Pernyataan itu disampaikan saat jaksa mendalam relasi keduanya.

"Tidak kenal (Kusnadi sebelum jabat jadi ketua DPRD). Sejak kami di Gubernur, kami mendapat mandat beliau sebagai Ketua DPRD. Belum (sebelumnya tidak kenal)," kata Khofifah.

Ia menjelaskan bahwa hubungan dengan pimpinan DPRD Jatim murni dalam kerangka kedinasan. "Kalau seluruh pimpinan kami kenal sebagai tugas beliau pimpinan DPRD. Ada Pak Kusnadi, Ibu Anik Maslachah, Arfan Iskandar, dan Pak Anwar Sadad," ujarnya. Saat ditanya asal partai Kusnadi, Khofifah menjawab mengetahui bahwa yang bersangkutan berasal dari PDIPerjuangan.

Dalam sesi lanjutan, JPU mencecar Khofifah soal mekanisme penentuan anggaran hibah pokir 2020 senilai Rp 2,8 triliun. Jaksa membandingkannya dengan anggaran hibah non-pokir seperti Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSOP) dan program lainnya yang mencapai sekitar Rp 4 triliun.(ant,pristi/dya)

Jaksa KPK akan Kaitkan dengan Bukti Lain

JAKSA Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan keterangan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam sidang dugaan korupsi dana hibah akan dikaitkan dengan alat bukti lain dalam berkas perkara.

"Kesaksian dalam tuntutan nanti akan dihubungkan dengan alat bukti yang lain," ujar Bagus Dwi Arianto, JPU KPK, usai persidangan.

Menurut Bagus, pemeriksaan terhadap Khofifah difokuskan pada penelusuran mekanisme penganggaran dana hibah di lingkungan Pemprov Jatim. Dalam persidangan terungkap adanya alokasi hibah pokok pikiran (pokir) bagi anggota DPRD Jatim, termasuk untuk Kusnadi, mantan Ketua DPRD Jatim,

serta pimpinan dewan lainnya.

"Pemeriksaan hari ini sesuai dengan fakta persidangan untuk mengetahui mekanisme penganggaran. Keterangan dari Ibu Khofifah selaku gubernur menguatkan keterangan saksi-saksi sebelumnya yang diperiksa kami," katanya.

Ia menambahkan, dalam mekanisme tersebut memang terdapat jatah hibah pokir bagi anggota legislatif. "Dan memang di situ ada jatah hibah pokir untuk para anggota dewan, di antaranya Kusnadi dan pimpinan dewan lainnya," ujar Bagus.

Terkait dugaan aliran fee ijon sebesar 30 persen sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kusnadi, jaksa

mengebut Khofifah telah membantahnya di persidangan.

"Hari ini Ibu Khofifah menerangkan bahwa saksi sendiri tidak menerima fee atas pengelolaan hibah, fakta persidangan demikian," tuturnya.

Untuk agenda sidang berikutnya, tim jaksa akan memusatkan perhatian pada empat terdakwa lain dalam perkara ini, yakni Hasanuddin, mantan anggota DPRD Jatim; Jodi Pradana Putra, pihak swasta asal Blitar; Sukar, mantan kepala desa di Kabupaten Tulungagung; serta Wawan Kristiawan, pihak swasta asal Tulungagung.

"Kami fokus kepada empat terdakwa dulu, untuk menuntaskan perkara di Pak Wawan, Sukar, dan Hasanuddin," kata Bagus.(ant,ust/dya)